

POLITIK GLOBAL DAN ISU TERORIS

Irwansyah

Abstrak

Politik Global dan Isu Terorisme dua hal yang pada mulanya tidak mempunyai kaitan sama sekali, karena “Politik Global” terkait dengan satu era yang disebut “Global” atau “Globalisasi” yakni proses marketing dari sebuah hasil product yang transnasional, yang gejalanya dimulai tahun 1990-an, sedangkan “Isu Terorisme” muncul belakangan, yakni sepuluh tahun kemudian.

Kata Kunci : Politik, Global, Globalisasi, Transnasional

Pendahuluan

Gelobalisasi sebagai “dekade” atau “era” disebut-sebut gejalanya pada tahun 1990 an. Pada awalnya “ide globalisasi” dipromosikan dalam marketing global dan perencanaan strategis dalam perusahaan-perusahaan “transnasional”, yang dipelopori oleh Coca-cola, Ford, dan McDonald’s. Dengan menggunakan metode produksi standard, yang dikenal sebagai bentuk rasionalisasi dunia, mereka membuat produk inti yang dikenal secara global untuk pasar nasional.²

Tetapi belakangan, maksudnya mungkin sekitar tahun 2000 an, istilah “globalisasi” bukan saja menjadi konsep ilmu pengetahuan dalam bidang sosial ekonomi, tetapi telah menjadi jargon politik, ideologi pemerintahan dan hiasan bibir masyarakat.³

¹“keluar dari batas-batas negara”. [Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1209].

²William Outhwaite (ed), “The Balckwell Dictionary of Modern Social Thought”, alih bahasa Tri Wibowo B.S. *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 344.

³Didik J. Rachbini, “Mitos dan Implikasi Globaliosasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan”, Kata Pengantar dalam Edisi Indonesia, Paul Hirst dan Grahame Thompson, “Globalization and Question”, *Globalisasi Adalah Mitos*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. vii.

Antara persoalan ekonomi dan persoalan politik memang sangat dekat sekali; kedekatan ini disebabkan karena kalau ekonomi bicara soal kebutuhan, maka politik membicarakan soal bagaimana menguasai apa yang dibutuhkan itu. Kalau ekonomi global, utamanya dikuasai oleh Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, sudah tentulah politik dunia juga akan dikuasai oleh ketiga negara tersebut. Dan salah satu isu politik dunia di era globalisasi adalah “terorisme”. Dan menyangkut isu terorisme ini disebut orang bahwa Amerika Serikat adalah negara yang menyebarkannya, bukan Eropa dan Jepang.

Bagaimana politik global dan isu teroris itu muncul dari padanya adalah upaya yang akan dilakukan pencariannya dalam makalah ini. Namun bila tidak ditemukan kejelasannya, semoga makalah ini dapat berguna menghantar diskusi ke arah harapan itu.

Politik Global

Para pakar dunia politik dan para sosiolog pada umumnya menerima anggapan Max Weber, bahwa ciri khas negara modern adalah pemilikan monopoli atas dipakainya sarana kekerasan di dalam wilayah tertentu.⁴

Di abad ke 17 sistem negara modern diciptakan dan sama-sama diakui oleh para anggotanya. Yang terpenting adalah bahwa setiap negara merupakan satu-satunya penguasa dengan pemilikan eksklusif terhadap suatu wilayah yang telah ditentukan. “Negara” merupakan bentuk dominan pemerintah, tidak ada badan lain yang menjadi rivalnya.

Abad pertengahan tidak mengenal hubungan tunggal antara penguasa dan wilayah. Penguasa politik dan bentuk-bentuk lain pemerintahan fungsional yang khas sudah ada dalam bentuknya yang kompleks dan tumpang tindih, sehingga mereka itu sejajar dan seringkali bersaing di dalam wilayah yang sama.⁵

⁴Max Weber, *Economy and Society*, (Bedminster Press, 1968), h. 56.

⁵Gierke, (ed), *Political Theories of The Middle Ages*, (Cambridge: University Press, 1988), h.79.

Sementara itu era dominasi negara bangsa sebagai badan pemerintahan sekarang ini telah lewat, bahkan sekarang ini kita memasuki era dimana pemerintah dan wilayah akan terpisah, badan-badan yang lain akan menguasai aspek pemerintahan dan sejumlah aktifitas penting akan tidak terkendali.

Negara modern tidak meraih monopoli pemerintahannya dari usaha internal saja. Setelah *Traktat Westphalia* tahun 1648 pemerintah-pemerintah tidak lagi mendukung *coreligionis* yang menentang negaranya sendiri. Saling pengakuan oleh negara-negara atas kedaulatan masing-masing di dalam persoalan yang paling kontemporer, yaitu kepercayaan agama, berarti bahwa negara-negara berkemauan membatasi politik tertentu sebagai ganti atas kontrol internal dan stabilitas. Dengan memanfaatkan otonomi, bebas dari campur tangan pihak luar yang disepakati oleh persetujuan bersama yang bersifat internasional ini, maka negara dapat meletakkan “kedaulatannya” di atas bahu masyarakat.

Timbulnya negara modern sebagai kekuasaan yang spesifik secara teritorial dan yang dominan secara politis, dengan demikian tergantung untuk sebagian pada persetujuan internasional. Pemahaman secara internasional ini memungkinkan terjadinya “internalisasi” kekuasaan dan politik di dalam negara itu. Setiap negara adalah berdaulat dan karena itu setiap negara menentukan di dalam dirinya sendiri kebijakan internal dan eksternalnya.

Hubungan-hubungan internasional dapat dipandang sebagai interaksi global, yang dibatasi oleh saling pengakuan dan kewajiban untuk menahan diri untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Pada abad ke 19 dan ke 20 rezim liberal dan demokrasi mewarisi tuntutan absolutisme atas kedaulatan ini di dalam teritorial yang dikuasai secara eksklusif dan memberikan legitimasi baru kepadanya.

Namun suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa nasionalisme membuat kerjasama internasional menjadi sulit, karena

nasionalisme memperluas dan memperdalam lingkup “kedaulatan”: ia memerlukan berbagai kesesuaian kultural tertentu bagi warga negara; konsep homogenitas kultural, teritorial yang berdaulat, dan memperkuat pemahaman komunitas nasional sebagai tuan atas nasibnya sendiri.⁶

Demokrasi tidak memberikan dampak yang lebih besar terhadap sisi fundamental negara berdaulat dan demokrasi, dalam arti pemerintahan perwakilan atas dasar pemilihan umum, sekaligus menjadi ideologi dan aspirasi universal pada akhir abad ke 20. Pengertian tentang “rakyatlah yang berdaulat” dengan mudah menggantikan kedaulatan, dengan menggabungkan klaim yang terakhir ini pada suatu supremasi sebagai sarana untuk mengadakan keputusan politik di kawasan tertentu.⁷

Demikian juga, demokrasi dan nasionalisme dengan cara saling menunjang, dapat dibuat saling cocok. Demokrasi memerlukan ukuran homogenitas kultural yang cukup (atau diakuinya perbedaan kultural secara umum di dalam identitas politik yang melingkunginya) agar demokrasi itu dapat diterima. Penentuan nasib sendiri secara nasional adalah tuntutan politik yang legitimasinya berasal dari pengertian demokrasi dan homogenitas kultural yang sama.

Dalam teori demokrasi modern bahwa kekuasaan itu pada akhirnya berasal dari rakyat dan pemerintah, tetapi haruslah atas dasar kesepakatan. Antara negara dan masyarakat adalah entitas yang terpisah. Kedaulatan negara tidak terikat pada persetujuan-persetujuan yang ada sebelumnya. Ia ibarat komandan yang tidak dikomando. Pemilihan yang demokratis melegitimasi kekuasaan yang berdaulat dari lembaga negara, dan dengan demikian memberikan landasan yang lebih baik bagi negara sebagai organ komunitas teritorial yang mengatur dirinya sendiri dan bukan diatur menurut kehendak

⁶Paul Hirst Grahame Thomson, “Globalization In Question”, Terj. P. Sumitro, *Globalisasi Adalah Mitos: Sebuah Kesangsian Terhadap Konsep Globalisasi dan Kemungkinan Aturan Mainnya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 260.

⁷Paul Hirst Grahame Thomson, “Globalization...”, h. 262.

raja. Kedaulatan yang demokratis memasukkan warga negara dan mengikatnya melalui keanggotaan bersama dan tidak untuk yang lain.

Negara yang diperintah melalui perwakilan yang modern akan memerintah teritorial secara penuh dan komprehensif, sesuatu yang tidak terdapat pada waktu rezim sebelumnya. Pemerintah perwakilan memantapkan dan melegitimasi kemampuan negara untuk membebaskan pajak dan, dengan kekuasaan fiskal ini dan dihilangkannya kekuasaan yang saling bersaing dan subordinatif, ia dapat menciptakan sistem administrasi nasional yang seragam. Atas dasar ini ia dapat memperluas pemerintahan terhadap masyarakat, misalnya dengan menciptakan sistem untuk pendidikan nasional atau kesehatan umum.

Menjelang tahun 1960-an negara tampak merupakan entitas sosial yang dominan: negara dan masyarakat adalah sama. Negara mengatur dan mengarahkan masyarakat baik di negara komunis maupun di Barat, meskipun dalam cara yang agak berbeda. Negara-negara komunis merupakan varian lain dari tujuan pengelolaan ekonomi nasional, yang dicapai melalui perencanaan terpusat. Pada tahun 1960-an, akses konstruksi sosialis yang dipaksakan tampaknya bakal lewat dan golongan reformasi seperti khrushchev menjanjikan kemakmuran yang lebih besar dan hidup bersama secara damai dan bukannya konflik terbuka dengan barat.⁸

Di negara-negara industri Barat telah umum diakui bahwa manajemen ekonomi nasional dapat berlanjut dan dapat menjamin baik kesempatan kerja yang penuh maupun pertumbuhan yang relatif mantap. Negara-negara industri, Timur dan Barat merupakan badan pemberi jasa publik yang bermacam ragam, mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan menyediakan setiap aspek kehidupan bagi komunitasnya. Di dalam masyarakat Barat yang terbentuk oleh revolusi industri, dimana mayoritas

⁸ Paul Hirst Grahame Thomson, "Globalization...", h. 264.

penduduk tetap merupakan buruh tangan bahkan sampai tahun 1960-an, pelayanan kesehatan nasional yang seragam dan universal, pendidikan dan kesejahteraan tetap populer. Penduduk yang baru saja lepas dari krisis kapitalisme yang tidak teratur tetap menerima perlindungan sosial oleh negara secara kolektif, bahkan ketika mereka menikmati keadaan banyaknya orang kaya baru yang diciptakan oleh kesempatan kerja dan “boom” yang panjang setelah tahun 1945.

Dewasa ini persepsi tentang negara telah berubah tidak sebagai mana yang telah diakui dan perubahan itu cepat sekali. Revolusi tahun 1989 di Eropa Timur dengan segala akibatnya, mengubah persepsi yang umum diterima, bahwa dunia modern merupakan suatu dunia dimana negara bangsa telah kehilangan kemampuan pemerintahannya dan proses-proses pada tingkat nasional menyerahkan supremasinya kepada yang bersifat global.⁹

Apa yang diakhiri pada tahun 1989 adalah struktur konflik antar kelompok negara-negara bangsa yaitu perang dingin. Kekuatan pendorong konflik ini adalah perasaan khawatir yang sama-sama dirasakan oleh 2 blok yang kemudian oleh kedua pihak dieksploitasi untuk tujuan-tujuan ideologis tetapi sebenarnya pada awalnya bukanlah konflik ideologi. Perang dingin tersebut memperkuat kebutuhan akan negara bangsa, berikut kemampuan militernya dan akan bentuk ekonomi pada tingkat nasional dan regulasi spesial yang diperlukan untuk mendukungnya. Sistem negara-negara membeku menjadi pola konfrontasi yang kaku dan pasif di pusat, dengan konflik secara perwakilan di pinggiran. Sampai tahun 1989 hal itu masih mungkin terjadi bahwa kedua negara adikuasa dengan sekutu-sekutunya melibatkan diri ke dalam perang, meskipun kemungkinannya kecil sekali lantaran berarti sama-sama bunuh diri. Jika negara-bangsa itu lemah atau kehilangan kemampuan

⁹Paul Hirst Grahame Thomson, “Globalization ...”, h. 265.

untuk mengendalikan masyarakatnya mungkin musuh akan menyerbu, menghancurkan apa yang diperoleh. Konflik yang tersumbat ini dilain sisi mempertahankan pentingnya pemerintah tingkat nasional dengan cara menunda atau menyelubungi perubahan yang akan melemahkannya.

Namun, titik balik dalam kesadaran sejarah tengah berlangsung. Setidaknya bagi puluhan ribu orang dari seluruh dunia yang berkumpul di Seattle. Pada November 1999 untuk memprotes kebijakan WTO dan Globalisasi korporat. Demikian juga bagi jutaan orang di seluruh dunia yang mendukung apa yang diperjuangkan oleh para demonstran. Sesuatu yang penting tengah berlangsung. Mendekati berakhirnya abad ke 20 mulai tampak sebuah masa depan sebuah alternatif bagi sistem dunia pasca perang dingin. Protes-protes yang dilakukan bersama-sama oleh aktifis lingkungan, aktifis serikat buruh, serta petani subsisten dunia ketiga dan para pendukungnya, menyerukan penghapusan utang dan lain-lain. Mereka berhasil menggagalkan sesi pembukaan pertemuan WTO dan memberi sumbangan penting bagi kegagalan apa yang oleh Presiden Clinton dan pemimpin dunia lain harapkan akan terjadi putaran baru bagi liberalisasi investasi dan perdagangan.¹⁰

Protes Seattle bukan merupakan bagian dari debat tentang perdagangan bebas, melainkan justru sebagai penghancuran terhadapnya. "Kejutan Seattle", istilah yang digunakan dalam editorial *bisnis week* untuk memperingatkan perlawanan rakyat terhadap "sistem ekonomi kita", mencerminkan kesadaran yang makin tinggi bahwa isu-isu yang diperbincangkan dalam ruang-ruang konferensi oleh para ahli perdagangan dan menteri keuangan adalah isu-isu yang membakar jutaan orang.

Perdebatan tentang globalisasi tak jarang disampaikan dalam bentuk dikotomi yang tegas antara "baik" dan "buruk". Persoalan sebenarnya jauh

¹⁰William K. Tabb, "Globalization and the Struggle for Social Justice in the Twenty First Century", terj. Huzail Fauzan dkk, *Tabir Politik Globalisasi*, Cet. II, (Yogyakarta: Lafadl Pustaka, 2006), h. 1-2.

lebih kompleks. Penting untuk memilah bagi siapa globalisasi itu baik, dan bagi siapa ia buruk. Begitu pula bagaimana membuat globalisasi menjadi ramah pada orang-orang yang telah merasakan konsekuensi yang terparah. Operasi proses globalisasi terjadi dalam, dan diperantarai oleh serangkaian kerangka aturan mulai yang bersifat transnasional sampai lokal.¹¹

Perusahaan-perusahaan menuntut pemerintahan manapun untuk mengurangi pajak. Memulihkan kemampuan negara untuk menarik pajak atas kapital adalah langkah penting, karena mayoritas warga negara banyak menggantungkan hidupnya dari barang dan jasa yang menjadi layanan publik. Termasuk nilai ruang publik dan kualitas dan kehidupan sosial yang diusahakan atau gagal dipenuhi oleh pemerintah. Tidak sulit untuk mengkonseptualisasikan kesatuan pajak atas korporasi, yang didasarkan pada pendapatan di seluruh dunia. Dan uang pajak tersebut bisa didistribusikan secara merata ke negara-negara dimana barang/jasa perusahaan tersebut diproduksi dan dijual. Kesulitan yang menghadang bersifat politis, karena tekanan kekuasaan dari perusahaan transnasional.¹²

Politik Global secara historis dipandang sebagai hasil dari tradisi panjang dimana asumsi superioritas cara berpikir, pengaturan ekonomi maupun budaya Barat, menopang kolonialisme dan imperialisme. Orang-orang ditaklukkan dan didominasi, sumber daya mereka dirampas. Dan kerangka aturan tersebut kemudian dijustifikasi, misalnya lewat anggapan bahwa para penindas membawa pelita pada orang-orang yang ditindas, menunjukkan mereka jalan yang lebih baik, dan sebagainya. Kalau dulu orang melakukan penjajahan dengan mengatakan: “Tuhan memerintahkan kita melakukan hal ini”, tetapi sekarang pun semangat eksploitasi seperti ini berlangsung bersama proses globalisasi.¹³

¹¹William K. Tabb, “Globalization...”, h. 14.

¹²William K. Tabb, “Globalization...”, h. 34-35.

¹³William K. Tabb, “Globalization...”, h. 35-36.

Lebih lanjut misalnya dikembangkan berbagai isu antara lain: “tanggung jawab orang kulit putih”, “missi peradaban”, “menghentikan agresi komunis”, “menciptakan dunia yang nyaman bagi demokrasi”, “doktrin Monroe”, “doktrin Truman”, ataupun “menghentikan Genocide”; yang semuanya itu adalah tujuan yang ditempatkan di bawah kepentingan menguasai sumber daya negara lain. Inilah modus imperialisme ala politik global.¹⁴

Isu Teroris

Pembahasan isu terorisme dalam pertemuan puncak forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) ke-11, yang berlangsung di Thailand 20-21 Oktober 2003, tak terhindarkan. Isu terorisme telah memperkuat dominasi agenda APEC selama tiga kali pertemuan terakhir. Dimulai dari KTT APEC ke-9 di Shanghai, Cina, Oktober 2001, KTT APEC ke-10 di Los Cabos, Mexico, Oktober 2002, dan di Thailand 2003.

Bahkan isu terorisme, terkesan "mengesampingkan" isu liberalisasi perdagangan dan investasi yang selalu menjadi tema pertemuan APEC sebelumnya. Karena serangan teroris terhadap gedung WTC dan Pentagon di Amerika Serikat, September 2001, dan tragedi bom Bali, Oktober 2002, mempunyai pengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu negara dan berakibat pada kelambanan ekonomi dunia, para pemimpin APEC menganggap bahwa isu ini terlalu penting untuk dikesampingkan. Meski demikian, usaha negara APEC untuk memerangi terorisme tidak mengabaikan misi APEC dalam mendorong arus perdagangan bebas barang dan mobilitas penduduk APEC. Di samping itu, kepentingan sektor keamanan tidak harus mengorbankan keterbukaan ekonomi yang menjadi dasar kemakmuran bersama. Karena para pemimpin APEC menganggap bahwa tindakan bersama dalam memerangi terorisme diperlukan guna menciptakan perdamaian, kesejahteraan, dan

¹⁴William K. Tabb, “Globalization...”, h. 105.

keamanan suatu bangsa, maka pertanyaannya, sampai sejauh mana APEC merespons isu terorisme sehingga dapat berjalan secara paralel dengan pembangunan ekonomi di kawasan?

Deklarasi Shanghai yang berjudul APEC Economic Leader on Counter Terrorism menyatakan segala bentuk aksi terorisme yang ditujukan kepada siapa pun dan dalam bentuk apa pun merupakan ancaman bagi perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan suatu bangsa. Terorisme juga merupakan ancaman langsung terhadap visi APEC yang bebas dan terbuka serta nilai fundamental yang dimiliki anggotanya. Berkaitan dengan aksi memerangi terorisme, mereka menyatakan untuk menghindari segala bentuk aksi teror di masa datang sesuai Piagam PBB dan hukum internasional dan bertekad mewujudkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1373.

Tujuan resolusi itu adalah untuk menghadapi aksi terorisme global yang mengikat 189 negara anggota PBB dan mewajibkan negara anggotanya untuk mencari, menghukum, atau mengekstradisi teroris yang ditemukan di wilayahnya. Para pemimpin APEC mengundang negara-negara untuk saling tukar informasi mengenai jaringan teroris dan membekukan aset maupun membendung arus dana para teroris. Selain itu, para pemimpin APEC sepakat meningkatkan keamanan angkutan udara dan laut sesuai persyaratan internasional. Begitu juga dengan resolusi 1438 DK PBB Oktober 2002, yang menyatakan serangan di Bali sebagai sebuah ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, harus mendapat prioritas utama politik luar negeri negara-negara APEC.

Untuk itu para pengambil keputusan di APEC mempertegas komitmen bersama melawan semua langkah yang mengancam perdamaian dunia, keamanan, dan kelangsungan ekonomi regional, yang dituangkan dalam deklarasi Los Cabos dengan judul APEC Leaders Statement on Recent Acts of Terrorism in APEC Member Economies dan APEC Leaders Statement on Fighting Terrorism and Promoting Growth. Prakarsa Security Trade in the

APEC Region (STAR) yang ditetapkan para pemimpin APEC berkaitan dengan inisiatif pengamanan perpindahan barang dan manusia juga dijadikan landasan APEC untuk menjamin stabilitas keamanan kawasan dalam memerangi terorisme.

Adapun STAR berisi: pertama, memberlakukan peralatan dan prosedur baru pemeriksaan bagasi di semua bandara anggota APEC sebelum tahun 2005. Kedua, memperkuat pintu di dalam pesawat penumpang sebelum April 2003. Ketiga, mengidentifikasi dan memeriksa kontainer untuk pengangkutan lewat laut yang berisiko tinggi dengan memberi informasi elektronik lebih dulu kepada petugas bea cukai, pelabuhan, dan perkapalan. Keempat, mengimplementasikan standar umum pelaporan bea cukai secara elektronik sebelum tahun 2005. Kelima, meningkatkan rencana keamanan kapal dan pelabuhan sebelum Juli tahun 2004. Keenam, memasang sistem identifikasi otomatis pada kapal-kapal tertentu sebelum tahun 2004.

Meski kedua deklarasi itu dapat dijadikan sebagai langkah antisipasi menghadapi terorisme, kontribusi negara APEC dalam memerangi terorisme seharusnya terbatas pada dukungan langkah praktis dan nonpolitis untuk memperketat pengawasan terhadap terorisme dan bukan memberikan dukungan bagi kampanye militer pimpinan AS ke Afganistan maupun ke Irak. Begitu juga sikap para pemimpin APEC untuk tidak mendukung unilateralisme AS dapat dijadikan sebuah keputusan yang tepat dan menunjukkan bahwa dialog membangun saling percaya lebih mempunyai makna keamanan secara komprehensif bagi APEC ketimbang harus menuruti kemauan politik AS.

Dengan demikian, pengembangan saling percaya merupakan hal yang amat penting dalam suatu kerja sama. Ia dapat menjadi landasan kokoh bagi suatu kerja sama keamanan regional dan dapat berfungsi sebagai wahana untuk meningkatkan pemahaman mengenai sifat ancaman dan kapabilitas keamanan dari masing-masing anggota komunitas melalui mekanisme dialog regional. Kerja sama APEC dalam kerangka keamanan komprehensif akan

memberi beberapa manfaat, seperti: pertama, pembangunan komunitas keamanan akan membuka peluang dibentuknya zona kemakmuran ekonomi. Kedua, memberi anggota komunitas suatu struktur yang praktis guna mengatasi masalah lingkungan keamanan mereka. Ketiga, terciptanya dialog yang lebih terbuka mengenai masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan keamanan.

Yang menjadi pertanyaan kini, bagaimana APEC dapat mengintegrasikan hubungan di antara anggotanya satu sama lain secara lebih solid dalam menangani masalah terorisme pascatragedi WTC dan bom Bali. Ini merupakan tantangan APEC di masa depan. Di satu pihak, penandatanganan deklarasi Shanghai dan Los Cabos merupakan pengesahan bagi proses memerangi terorisme di kawasan. Di pihak lain, proses implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Kini tugas para pemimpin APEC di Thailand adalah bagaimana melakukan aksi regional yang didukung civil society untuk mengimplementasikan dua deklarasi di atas menjadi sebuah pilar strategi yang efektif.

Bagaimana para pemimpin APEC dapat membangun norma-norma pencegahan dan pemberantasan terorisme, agar aksi mereka dapat diakhiri, merupakan tantangan tersendiri. Tanpa pendekatan regional yang terkoordinasi, upaya masing-masing negara anggota APEC untuk mengontrol keberadaan teroris akan sulit diatasi. Kredibilitas APEC dalam menangani isu terorisme akan meningkat jika ia mampu menerjemahkan komitmennya ke dalam langkah-langkah kebijakan regional yang realistis dan strategis. Termasuk pembentukan zona kemakmuran ekonomi bagi anggota APEC dengan memerangi ancaman deflasi global (indikasi resesi ekonomi), membiarkan ekonomi dunia terbuka terhadap arus perdagangan, dan memulihkan kembali keyakinan investor yang dirusak oleh skandal korporasi AS yang membuat lesu aktivitas perusahaan berskala kecil maupun besar.

Dengan demikian, kontribusi APEC bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global, harapannya dapat meningkatkan sistem perdagangan multilateral yang terbuka yang terkait dengan aspek ekonomi di kawasan. Kontribusi APEC dalam mencegah ancaman terorisme yang muncul dengan mempertemukan kepentingan-kepentingan keamanan secara bersama-sama niscaya dapat menciptakan sebuah perimbangan kepentingan ekonomi di antara anggota APEC di masa yang akan datang.

Faktor Menguatnya Teroris

Terorisme dalam arti “pembikinan takut dengan melakukan pembunuhan, penculikan dan sebagainya”¹⁵, muncul ketika ada krisis, terutama krisis politik seperti krisis negara yang terpecah (kasus Lebanon), merajalelanya korupsi (kasus Italia), atau sangat refresif (kasus Jerman Barat), atau sistem politik tersumbat (kasus Italia tahun 1970 sebagai akibat “kompromi historis” antara partai Demokrat Kristen dan Komunis).¹⁶

Karen Armstrong, menjelaskan adanya kaitan antara teroris dengan fundamentalis. Ketika mengemukakan tema *Fundamentalisme* dalam bukunya *Berperang Demi Tuhan*,¹⁷ ia menggambarkan bahwa fundamentalisme itu muncul sebagai akibat dan juga dapat menjadi sebab terjadinya peristiwa lain. Ekspresi fundamentalisme menurut Armstrong, terkadang cukup mengerikan. Para fundamentalis menembaki jamaah yang sedang salat di mesjid, membunuh para dokter dan perawat dalam klinik aborsi, membunuh presiden dan bahkan mampu menggulingkan pemerintahan yang kuat. Akan tetapi hanya sebagian kecil saja dari mereka yang melakukan tindakan terorisme seperti itu.¹⁸

¹⁵Osman Raliby, *Kamus Internasional*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h 513.

¹⁶William Outhwaite (ed), “The Balckwell ...”, h. 874-875.

¹⁷Karen Armstrong, “The Battle fo God”, terjemahan: Satrio Wahono dkk., *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, (Jakarta: Serambi, 2001), h. 209-585.

¹⁸Karen Armstrong, “The Battle ...”, h. ix.

Fundamentalisme tanpa terorisme, merupakan gejala kebangkitan “agama” di dunia Barat yang sekuler. Orang modern beranggapan bahwa sekularisme adalah suatu keniscayaan dan bahwa faktor agama tidak lagi berperan penting dalam peristiwa-peristiwa besar dunia. Aksiomanya adalah jika manusia menjadi lebih rasional, maka mereka tidak akan lagi membutuhkan agama. Atau kalau tidak, mereka akan memasukkan agama itu menjadi sesuatu yang pribadi, suatu wilayah kehidupan privat. Namun, pada akhir tahun 1970-an, kaum fundamentalis mulai berusaha mengembalikan agama dari posisi yang marginal ke posisinya semula yang sentral. Mereka melawan hegemoni kaum sekular.¹⁹ Ide-ide mereka sebenarnya sangat modern dan inovatif, tetapi sikap mereka konservatif karena selalu dekat dengan masa lampau.²⁰ Lalu bagaimana konsep “fundamentalisme” ini dapat melahirkan “terorisme”.²¹

Kaum fundamentalis disebut juga sebagai “kaum fanatik modern”, karena salah satu cirinya adalah “tidak adanya toleransi”. Fatwa Ayatullah Khomeini bulan Februari 1989, terhadap Salman Rushdie, karena menulis novel *The Satanic Verses* (1986), munculnya gerakan Ikhwan al-Muslimun, yang anggotanya menghancurkan gedung bioskop dan restoran yang umumnya ramai dikunjungi orang asing, merazia wanita yang tidak mengenakan jilbab; terbunuhnya Anwar Sadat oleh seorang militan Muslim (1981), karena dianggap memihak kepentingan Israel dan Amerika Serikat, adalah diantara berbagai contoh “gerakan fundamentalisme” Islam.²²

¹⁹Karen Amstrong, “The Battle ...”, h. x.

²⁰Karen Amstrong, “The Battle ...”, h. xi.

²¹Kaum Protestan Amerika adalah orang-orang pertama yang menggunakan, dan menyebut diri mereka, “fundamentalis”. Hal ini dilakukan untuk membedakan mereka dari kaum Protestan yang lebih “liberal” yang menurut mereka telah merusak keimanan Kristen. Kaum fundamentalis ingin kembali ke dasar dan menekankan kembali aspek “fundamental” dari tradisi Kristen, suatu tradisi yang mereka defenisikan sebagai pemberlakuan penafsiran harfiah terhadap kitab suci serta penerimaan doktrin-doktrin inti tertentu.

²²Steve Bruce, *Fundamentalisme: Pertautan Sikap Keberagamaan dan Modernitas*, terjemahan: Herbhayu A. Noerlambang, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 2-3.

Sejak tahun 1968, Amerika Serikat menjadi negara yang sering menjadi sasaran teroris. Unit departemen penangkalan aksi terorisme melaporkan bahwa sepanjang tahun 1990-an, 40 persen dari semua tindakan terorisme di seluruh dunia adalah menentang warga negara dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki Amerika.²³

Amerika Serikat menjadi target aksi teror kelompok fundamentalisme Islam, disebabkan tiga hal: *pertama* Amerika Serikat campur tangan terhadap politik Timur Tengah; *kedua* Amerika Serikat memihak negara Israel; *ketiga* Amerika Serikat sebagai simbol pembawa modernitas.²⁴

Dalam kaitannya dengan peristiwa teror runtuhnya gedung *World Trade Centre* (WTC), 11 September 2001, Giovanna Borradori mewawancarai dua orang filosof besar di zaman kontemporer ini, satu diantaranya adalah Jurgen Habermas. Menurut Habermas, ketika gerakan-gerakan yang diilhami oleh agama berjuang untuk membangun kembali “teokrasi”, itu sebuah fundamentalisme. Manakala fundamentalisme ini berhadapan dengan pengetahuan ilmiah dan pluralisme keagamaan, maka sikap eksklusifisme tumbuh dan berkembang, lalu dengan dibumbui motif-motif politis, jadilah ia “perang suci”, “perang syahid”, “jihad” dan lain sebagainya.²⁵ Berperang dengan “tanpa musuh yang jelas” inilah yang disebut “terorisme”.²⁶

Menurut Habermas ketika orang tidak tahu siapa musuhnya, seberapa besar kemungkinan bahaya yang akan menimpanya, saat itu terorisme sudah berhasil menjustifikasi dirinya. Osama bin Laden, dalam kasus WTC bukanlah musuh nyata, ia lebih mungkin berfungsi sebagai seorang pemeran pengganti. Terorisme yang untuk sementara waktu diasosiasikan dengan nama “Al-

²³Feisal Abdul Rauf, “What’s Right with Islam: A New Vision for Muslims and the West”, terjemah: Dina Mardina dan M. Rudi Atmoko, *Seruan Azan dari Puing WTC: Dakwah Islam di Jantung Amerika Pasca 11 September*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 187.

²⁴Steve Bruce, *Fundamentalisme ...*, h. 4.

²⁵Giovanna Borradori, “Philosophy in a Terror: Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida”, terjemah Alfons Taryadi, *Filsafat dalam Masa Teror*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), h. 49.

²⁶Giovanna Borradori, “Philosophy”, h. 42.

Qaeda” membuat tidak mungkin pengidentifikasian lawan dan setiap penilaian yang realistis atas bahayanya. Hal yang tak teraba inilah yang memberikan suatu kualitas baru kepada terorisme.²⁷

“Our war on terror begins with Al Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated... Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with terrorists”.²⁸

Kalimat di atas adalah maklumat perang melawan teror (*war on terror*) yang dikumandangkan Presiden George W. Bush lewat pidato kenegaraan di hadapan kongres Amerika, pada 20 September 2001, sembilan hari sesudah tragedi peledakan gedung kembar pencakar langit *World Trade Center* (WTC), New York, dan gedung Pentagon (Departemen Pertahanan Amerika), Washington DC, yang terjadi pada 11 September 2001. Pidato yang sangat “emosional” yang disampaikan oleh panglima tertinggi Angkatan Perang Amerika itu, dalam situasi Amerika berkabung, mendapat sambutan luar biasa, dengan 30 kali tepuk tangan selama 41 menit. Presiden Bush menegaskan bahwa sasaran perang melawan teror bukan hanya Al Qaeda, organisasi teroris pimpinan Osama bin Laden, yang dituding sebagai pelaku teror, tetapi seluruh jaringan teroris di dunia harus ditemukan dan dihentikan. Sejak malam itu “teror” telah dijadikan isu global. Dengan kata lain peristiwa 11 September 2001 dijadikan paradigma sebuah “teror global”.²⁹ Dan Amerika adalah negara yang membikin isu tersebut.

²⁷Giovanna Borradori, “Philosophy”, h. 43.

²⁸Ninan Koshy, *The War on Terror: Reordering the World*, (Hongkong: Daga Press, 2002), p. 7.

²⁹Habermas membedakan tiga macam terorisme. *Pertama* terorisme yang terjadi di Palestina masih memiliki ciri khas yang ketinggalan zaman dalam arti bahwa ia berputar sekitar pembunuhan, sekitar pembinasaan secara tanpa pandang bulu musuh-musuh, perempuan, dan anak-anak “hidup melawan hidup”. *Kedua* teror yang muncul dalam bentuk perang gerilya paramiliter. Bentuk teror jenis ini telah mencirikan banyak gerakan-gerakan kemerdekaan nasional dalam paroh kedua abad ke duapuluh. *Ketiga* teror global yang puncaknya adalah serangan 11 September, memiliki sifat-sifat khusus pemberontakan tanpa daya melawan musuh yang tak dapat dikalahkan dalam arti pragmatis. [Giovanna Borradori, “Philosophy in a Terror: Dialogues with

Atas desakan Amerika pula, Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) mengadakan sidang Dewan Keamanan PBB, pada 12 September 2001(keesokan harinya), yang menyepakati resolusi nomor 1372 tentang pembentukan lembaga PBB, yaitu *Center Terrorism Committee* (CTC), disusul dengan resolusi nomor 1390 yang mewajibkan negara-negara anggota memerangi “teroris global” dengan membekukan semua aliran dana bagi jaringan teroris di negara manapun.³⁰ Dengan resolusi tersebut, Amerika memegang mandat untuk dapat segera melakukan invasi ke Afganistan. Memang sudah bukan rahasia lagi bahwa negara itu memberi markas dan fasilitas bagi jaringan Al-Qaeda, yang dituduh berada di balik tragedi peledakan WTC dan Pentagon.

Terorisme di Indonesia

Eksekusi terhadap Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron tuntas sudah dilaksanakan pada kegelapan menjelang subuh di lembah Nirbaya, Nusakambangan, Cilacap, JawaTengah, hari Minggu, 9 November 2008. Penantian yang cukup panjang selama lebih dari enam tahun adalah sebuah penantian yang pasti sangat membosankan ditengah asa yang diharapkan oleh keluarga terpidana.

Stigma teroris melekat sudah bagi Amrozi Cs, dan hal tersebut juga menjadikan keluarga dan turunan mereka juga mempunyai *stigma* yang sama ditengah masyarakat. Aksi kekerasan dan terorisme yang dilakukan di Bali tahun 2002 dan beberapa aksi yang sama, telah menorehkan geliat sakit dan luka, kertak gigi serta duka bagi para keluarga korban. Korban jiwa dari orang-orang yang terkorbankan oleh tindakan teror tak tergantikan oleh apapun jua. Hukuman mati yang dilakukan dalam bentuk apapun juga, menurut para

Jurgen Habermas and Jacques Derrida”, terjemah Alfons Taryadi, *Filsafat dalam Masa Teror*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), h. 50].

³⁰Michael Chandler and Rohan Gunaratna, *Counter Terrorism: Can We Meet the Global Threat of Global Violence*, (London: Reaktion Books, 2007), p. 126-127.

keluarga korban dan sebagian besar masyarakat, merupakan hal yang pantas bagi pelaku teror atas aksi-aksi yang telah mereka lakukan.

Justru, bagi pelaku teror, aksi terorisme yang dilakukan menciptakan rasa bangga atas keberhasilannya menebarkan rasa takut, dan aksi yang dilakukannya merupakan suatu panggung pertunjukan, dimana masyarakat yang tidak terkena akibat teror merupakan bagian dari penonton atau audiens, sehingga pesan yang terukir dari akibat peneroran tersebut sangat kuat melekat di benak para audiensnya. Menurut *Don Delillo*, seorang novelis :”Terorisme tanpa kesaksian yang mengerikan tidak akan berarti, sebagaimana halnya dengan sebuah sandiwara tanpa audiens”.³¹ Kebanggaan bagi pelaku teror, yaitu dia melakukannya dengan alasan menegakkan agama atas nama jihad, sehingga keputusan pengadilan yang menghadiahkan hukuman mati bagi mereka, diterima dengan lapang dada dan tidak gentar.

Eksekusi Amrozi Cs, sebenarnya tidak menyurutkan gerakan terorisme di Indonesia, bahkan disinyalir ada babak-babak baru dalam panggung terorisme di Indonesia, yang terinspirasi oleh almarhum Amrozi Cs, karena akibat dari eksekusi mati mereka, justru mencuatkan Amrozi Cs menjadi “pahlawan” bagi pengikut dan pengagumnya. *Dalam ideologi teroris, tidak ada kata menyerah.*

Ada doktrin agama yang selalu menjiwai pergerakan mereka, yakni mati syahid. Mereka mengamini, bahwa apa yang dilakukan adalah “kebenaran mutlak” yang tidak dapat disangkal demi menegakkan agama Allah, sehingga ketika mereka mati sebagai syuhada maka yang akan diperoleh adalah jaminan surga. Semangat syahid inilah yang tidak menggentarkan dalam menghadapi maut yang bagi orang kebanyakan merupakan kegentarannya dalam menghadap Sang Khalik. Terlihat jelas pada waktu vonis dijatuhkan, teriakan “Allahu Akbar” membahana membelah langit sembari tangan diacungkan ke

³¹Mark Juergensmeyer, *Terror in The Mind of God*, (2000), h.178.

atas. Semangat *afirmatif* inilah yang dipekirakan berulang kali untuk mengobarkan militansi bagi para calon teroris yang sedang tertiarap dan bersembunyi di jaringan bawah tanah.

Pembentukan karakter "*pahlawan*" dalam diri Amrozi Cs, terpacu dan terpicu oleh gegap gempitanya berita yang dilansir oleh para pemburu berita yang dituangkan dalam kanvas pemberitaan di media *audio visual* (televisi) yang "*mendaulat*" tanpa disadarinya (oleh televisi), betapa Amrozi Cs pantas dan layak untuk dijadikan "*pahlawan*" dan pengobar semangat dalam gerakan Islam garis keras.

Pemberitaan media yang begitu mencekam telah mempersepsikan pada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Amrozi Cs adalah "*benar dan baik*" hal tersebut merupakan matarantai yang "*vis a vis*" yang tidak dapat dihindarkan karena Amrozi Cs via Televisi telah mendaulatkan bahwa untuk menjadi "*pahlawan*", harus melalui "*conditio sine qua non*" yang berlaku bagi mereka yaitu "*terorisme*". Akibat dari teror tersebut, maka hukuman mati yang menjadi vonis, menurut mereka adalah kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah.

Persepsi demi persepsi yang terakumulasikan oleh gencarnya pemberitaan media, bisa menjungkir-balikkan persepsi publik, sehingga timbul antitesis bahwa Amrozi Cs hanyalah merupakan "*kambing hitam*" dari konspirasi politik internasional.

Namun dipenghujung pemerintahan SBY periode pertama, pemerintah Indonesia telah lebih serius dan berani menyatakan "*perang*" terhadap teroris, sehingga berujung pada terbunuhnya gembong teroris Noordin M. Top dan kawan-kawan. Peristiwa ini bahkan menambah popularitas Indonesia di mata dunia. Dengan demikian masa depan terorisme di Indonesia, secara terlegitimasi adalah "*suram*" bilamana "*penjaga agama*", yakni lembaga-lembaga agama seumpama MUI tidak hanya mengecam dan mengharamkan

liberalisme, pluralisme dan sekularisme, tetapi yang lebih penting berani mengharamkan terorisme.

Masa depan terorisme di Indonesia tidak terlepas dari politik dunia dan wawasan pemikiran umat Islam terhadap agamanya. Keyakinan agama seseorang tentang kebenaran pemahamannya adalah hak azasi yang dilindungi undang-undang, akan tetapi segala macam dan jenis keresahan, kekacauan dan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh kepercayaan yang dianut itu adalah melanggar hak azasi orang lain. Mungkin konsep berpikir seperti inilah yang harus diemban oleh tokoh agama dan lembaga-lembaga yang dapat dikatakan sebagai “penjaga agama” dalam mengemban amanah dan bertanggung jawab terhadap munculnya sikap kekerasan atas nama agama.

Penutup

Politik Global dan Isu Terorisme dua hal yang pada mulanya tidak mempunyai kaitan sama sekali, karena “Politik Global” terkait dengan satu era yang disebut “Global” atau “Globalisasi” yakni proses *marketing* dari sebuah hasil product yang transnasional, yang gejalanya dimulai tahun 1990-an, sedangkan “Isu Terorisme” muncul belakangan, yakni sepuluh tahun kemudian.

Akan tetapi karena Amerika Serikat, sebagai salah satu dari tiga negara utama yang menguasai “pasar” secara global, belakangan menjadi negara adidaya yang mempunyai “pengaruh” dalam “menguasai” dunia. Dan bahkan sempat merasa “percaya diri” yang berlebihan, karena sejak tahun 1968 sampai tahun 1990-an, sungguhpun banyak mendapat serangan “teror” tetapi mampu bertahan dan semakin kuat; tiba-tiba saja pada tanggal 11 September 2001, gedung kembar pencakar langit *World Trade Center* (WTC), yang menjadi kebanggaan bangsa Amerika itu runtuh. Runtuhnya WTC itu sekaligus secara “resmi” dijadikan momentum telah terjadi “teror global”, paling tidak

menurut Presiden Amerika saat itu, yakni George W. Bush, dalam pidatonya 9 hari setelah peristiwa itu terjadi.

Dengan menjadikan “teroris” sebagai isu global, Amerika Serikat telah memperkokoh kekuasaannya untuk melakukan “pengawasan” yang oleh sebagian umat Islam justru dianggap sebagai “teror” pula.

Peran Amerika yang dalam sepak terjang politiknya dipandang merugikan umat beragama, terutama umat Islam inilah yang menyebabkan timbulnya sikap anti Amerika hampir diseluruh negeri Islam di Dunia, utamanya kelompok Islam yang disebut “fundamentalis”. Ketidakadilan Amerika sebagai “wasit” dalam perselisihan di Palestina, perang di Afganistan dan di India, telah menjadi “pupuk” bertambah subur nya “tunas” terorisme dan jejaringnya. Kerinduan sebagian umat Islam akan kepemimpinan Islam yang global, menjadi ladang subur untuk menguatnya tunas baru terorisme di bawah komando “tak jelas” dari sebuah nama Osama bin Laden dan organisasinya Al-Qaida. Bibit terorisme itu tersemai bukan hanya karena politik, tetapi karena doktrin dan ajaran agama yang difahami dari konsep tentang “jihad”. Sehingga bila dipandang dari sudut ini, maka persoalan terorisme sebenarnya dapat dikatakan bukan persoalan “kejahatan” tetapi persoalan “tafsir” dan pemahaman. Persoalan ketaatan dan fanatisme belaka. Allahu a’lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, Richard M., *Amerika VS Irak: Bahaya Politisasi Agama*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Outhwaite, William (ed), "The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought", alih bahasa Tri Wibowo B.S. *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Rachbini, Didik J., "Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan", Kata Pengantar dalam Edisi Indonesia, Paul Hirst dan Grahame Thompson, "Globalization and Question", *Globalisasi Adalah Mitos*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- Weber, Max, *Economy and Society*, (Bedminster Press, 1968).
- Gierke, (ed), *Political Theories of The Middle Ages*, (Cambridge: University Press, 1988).
- Tabb, William K., "Globalization and the Struggle for Social Justice in the Twenty First Century", terj. Huzail Fauzan dkk, *Tabir Politik Globalisasi*, Cet. II, (Yogyakarta: Lafadl Pustaka, 2006).
- Raliby, Osman, *Kamus Internasional*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).
- Amstrong, Karen, "The Battle fo God", terjemahan: Satrio Wahono dkk., *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, (Jakarta: Serambi, 2001).
- Bruce, Steve *Fundamentalisme: Pertautan Sikap Keberagamaan dan Modernitas*, terjemahan: Herbhayu A. Noerlambang, (Jakarta: Erlangga, 2002).
- Rauf, Feisal Abdul, "What's Right with Islam: A New Vision for Muslims and the West", terjemah: Dina Mardina dan M. Rudi Atmoko, *Seruan Azan dari Puing WTC: Dakwah Islam di Jantung Amerika Pasca 11 September*, (Bandung: Mizan, 2007).

Borradori, Giovanna “Philosophy in a Terror: Dialogues with Jurgen Habermas and Derrida, Jacques, terjemah Alfons Taryadi, *Filsafat dalam Masa Teror*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005).

Thomson, Paul Hirst Grahame, “Globalization In Question”, terj. P. Sumitro, *Globalisasi Adalah Mitos: Sebuah Kesangsian Terhadap Konsep Globalisasi dan Kemungkinan Aturan Mainnya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001)